

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
INTISARI	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	30
C. Tujuan Penelitian	31
D. Keaslian Penelitian.....	31
E. Kegunaan Penelitian.....	37
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	39
A. Pembagian Kekuasaan Antara Kepala Daerah dan DPRD	39
B. Kewenangan Presiden dalam Pemberhentian	47
C. Pemberhentian Bagian dari Pengawasan Pusat	55
D. Kewenangan DPRD dalam Pemberhentian Kepala Daerah	65
E. Sistem <i>Impeachment</i> dan <i>Forum Privilegiatum</i>	72
BAB III. LANDASAN TEORI	87
A. Teori Negara Kesatuan.....	87
B. Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah	98

C. Teori Pertanggungjawaban Pemerintahan.....	115
D. Teori Pemerintahan Presidensial.....	127
BAB IV. CARA PENELITIAN	142
A. Jenis dan Bahan/Materi Penelitian	142
B. Data Penelitian dan Cara Perolehan Data	143
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data.....	145
D. Metode Pendekatan	147
E. Analisis Data	148
F. Penarikan Kesimpulan	150
G. Jalannya Penelitian.....	150
H. Konsep-Konsep Pokok dan Batasan Pengertian	150
1. Pemberhentian.....	150
2. Pemakzulan	151
3. <i>Impeachment</i>	153
4. Kepala Daerah	154
I. Sistematika Penulisan	155
BAB V. PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH YANG PERNAH TERJADI DI INDONESIA	157
A. Pengisian Jabatan Kepala Daerah dalam Rezim Orde Lama	162
B. Pemberhentian Kepala Daerah dalam Rezim Orde Lama	171
1. Peletakan Kedudukan Kepala Daerah dan DPRD	172
2. Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.....	176
3. Pemberhentian Kepala Daerah	183
4. Pola Pemberhentian.....	193
5. Problem Pemberhentian di Era Orde Lama.....	201
C. Pengisian Jabatan Kepala Daerah dalam Rezim Orde Baru.....	205
D. Pemberhentian Kepala Daerah dalam Rezim Orde Baru.....	206

1.	Peletakkan Kedudukan Kepala Daerah dan DPRD	206
2.	Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD.....	212
3.	Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Pusat.....	214
4.	Pola Pemberhentian.....	215
5.	Problem Pemberhentian di Era Orde Baru.....	219
E.	Pengisian Jabatan Kepala Daerah Di Masa Transisi (UU No.22/199)	220
F.	Pemberhentian Kepala Daerah di Masa Transisi (UU No. 22/1999)	223
1.	Kewenangan Presiden dalam Pemberhentian Kepala Daerah ..	224
a.	Alasan Tindak Pidana Dengan Pertanggungjawaban	224
2.	Kewenangan DPRD dalam Pemberhentian Kepala Daerah.....	230
a.	Alasan Penolakan Pertanggungjawaban Akhir Tahun.....	230
b.	Alasan Tidak Lagi Memenuhi Syarat Dengan Tindak Pidana	234
c.	Alasan Melanggar Kewajiban dan Sumpah Jabatan	237
3.	Pemberhentian dalam Rezim Pertanggungjawaban	238
4.	Pemberhentian yang Diatur dalam Rezim Pemberhentian	246
5.	Tingkat Kesulitan Pemberhentian dan Implikasi yang Ditimbulkan	252
6.	Konflik Kepala Daerah dan DPRD	262
7.	Relevansi Kedudukan dan Kewenangan DPRD	269
8.	Problem Pemberhentian di Era Transisi.....	279
9.	Ilustrasi Pemberhentian Kepala Daerah dalam UU No. 22/1999	280
a.	Model Pemberhentian Kepala Daerah dalam Kanal Kewenangan Presiden yang bergesekan dengan Kewenangan DPRD.....	280
b.	Model Pemberhentian Kepala Daerah Di Tengah Masa Jabatan yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Kejahatan dalam Kanal Kewenangan Presiden.....	281

c.	Model Pemberhentian Kepala Daerah dalam Kanal Kewenangan DPRD.....	282
d.	Model Pemberhentian Kepala Daerah dalam Rezim Pertanggungjawaban dan Rezim Pemberhentian yang Berada pada Kanal Kewenangan DPRD.....	283
BAB VI.	PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DI MASA SETELAH PERUBAHAN UUD 1945 DAN KESESUAIANNYA DENGAN SISTEM KESATUAN.....	284
1.	Pengisian Jabatan Kepala Daerah Di Masa sesudah Perubahan UUD 1945.....	284
2.	Relevansi Kedudukan dan Kewenangan DPRD	287
3.	Alasan Pemberhentiandi Tengah Masa Jabatan.....	305
a.	Alasan Tindak Pidana	305
b.	Penerapan Pemberhentian Sementara	311
c.	Alasan dalam Sistem <i>Impeachment</i>	314
4.	Prosedur Pemberhentian: Dari Dua Tingkat Menjadi Satu Tingkat	319
a.	Memperkuat Hubungan Pusat dan Daerah.....	336
b.	Pengaruhnya Terhadap Fungsi Pengawasan DPRD	341
5.	Pemberhentian Melalui Penggunaan Hak Angket	353
a.	Perbedaan dengan Pemberhentian Berdasar Pasal 85 UU. No.23/2014.....	371
6.	Pemberhentiandengan Alasan Program Strategis Nasional	373
a.	Perbedaan Pendapat dalam Pembahasan RUU	373
b.	Alasan dan Corak Pemberhentian	380
c.	Perspektif Hubungan Pusat dan Daerah.....	387
7.	Problem Pemberhentian di Era Sesudah Perubahan UUD 1945.	396
8.	Ilustrasi Pemberhentian Kepala Daerah Di Tengah Masa Jabatan Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014...	397

a.	Model Pemberhentian Kepala Daerah dalam Kanal Kewenangan Presiden yang Beririsan dengan Kewenangan DPRD dari Segi Tindak Pidana.....	397
b.	Model Pemberhentian Melalui Penggunaan Hak Interpelasi dan Hak Angket dalam Kanal Kewenangan DPRD..	398
c.	Model Pemberhentian Kepala Daerah Di Tengah Masa Jabatan dalam Kanal Kewenangan DPRD Melalui Hak Angket Berdasar Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2014...	399
d.	Model Pemberhentian Kepala Daerah Di Tengah Masa Jabatan dalam Kanal Kewenangan DPRD Menurut Pasal 80 UU No. 23 Tahun 2014.....	400
e.	Model Pemberhentian Kepala Daerah Di Tengah Masa Jabatan Berdasar Pasal 68 UU No. 23 Tahun 2014..	401
BAB VII.	PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DALAM NEGARA KESATUAN DAN KAITANNYA DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL	402
A.	Pemberhentian Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial	404
1.	Alasan Pemberhentian Presiden USA Mempengaruhi Rumusan Pasal 7A	410
2.	Proses Perumusan Alasan <i>Impeachment</i> Presiden Indonesia....	413
B.	Alasan dan Prosedur Pemberhentian Kepala Daerah Dilihat Dari Parameter Sistem Presidensial	418
1.	Pergantian Kepala Daerah Karena Berhenti atau Diberhentikan.....	418
2.	Pergantian Presiden Karena berhenti atau Diberhentikan.....	421
3.	Alasan dan Prosedur Pemberhentian Karena Tidak Memenuhi Syarat	425
C.	Alasan dan Prosedur Pemberhentian Kepala Daerah Melalui Sistem <i>Impeachment</i>	429

1.	Alasan Tidak Melaksanakan Kewajiban	429
2.	Alasan Melanggar Larangan Kepala Daerah	434
3.	Alasan Melanggar Sumpah/Janji Jabatan	438
4.	Alasan Perbuatan Tercela	446
D.	Prosedur <i>Impeachment</i> Presiden dalam Sistem Presidensial	451
1.	Syarat Pengambilan Keputusan dalam Proses <i>Impeachment</i>	455
E.	Prosedur <i>Impeachment</i> Kepala Daerah	457
1.	Karakter Politik dan Hukum	466
F.	Prosedur Melalui Penggunaan Hak Interpelasi dan Hak Angket.....	474
1.	Prosedur Melalui Hak Angket: Dokumen/Keterangan Palsu....	480
2.	Tiga Obyek Hak Angket di Dua Kanal	487
3.	Angket Untuk Presiden dan Angket Untuk Kepala Daerah	494
BAB VIII. GAGASAN PERBAIKAN KE DEPAN		504
1.	Hubungan Antara Kepala Daerah dan DPRD	506
2.	Faktor Pertanggungjawaban	512
3.	Faktor Pengawasan	516
A.	Mengapa Tidak Didesain dalam Satu Sistem <i>Impeachment</i>	519
1.	Di Masa Orde Lama	520
2.	Di Masa Orde Baru	524
3.	Di Masa Transisi	528
4.	Di Masa Setelah Perubahan UUD 1945	534
B.	Pemberhentian Kepala Daerah Saat Ini Memperkuat Sistem NKRI.....	536
1.	Kelompok Pemberhentian Dalam Lingkup Kewenangan Presiden dan Menteri Dalam Negeri.....	538
a.	Pemberhentian Berdasar Putusan Pengadilan	538
b.	Pemberhentian Bersanksi Berjenjang-Campuran	542
2.	Kelompok Pemberhentiandalam Lingkup Kewenangan DPRD	548



a. Melalui Sistem <i>Impeachment</i>	548
b. Melalui Penggunaan Hak Interpelasi dan Hak Angket.....	554
3. Pemberhentian Kepala Daerah Lebih Sulit Dibandingkan Presiden	557
C. Perbaikan Ke Depan	560
1. Mempertegas Kewenangan Presiden dan DPRD	560
2. Menata Kembali Alasan <i>Impeachment</i> Kepala Daerah	561
BAB IX. PENUTUP	562
A. Kesimpulan	562
B. Saran.....	571
Daftar Pustaka.....	574